

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

1.1.1 Kesejahteraan Masyarakat

2.1.1.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Menurut KBBI yaitu berasal dari kata “Sejahtera” yang berarti kondisi yang aman, damai, makmur dan selamat (terbebas dari gangguan atau kesulitan) (Syahrin, Arifin, 2022). dan kata “Sejahtera” berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “*Cetera*” yang berarti payung. Dalam arti kesejahteraan “*Cetera*” menggambarkan seseorang yang hidupnya tenang dan aman, baik secara fisik maupun mental, karena terhindar dari ketakutan, kemiskinan, serta kebodohan (Purwana, 2014). Kesejahteraan merupakan keadaan seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari segi fisik, mental maupun sosial sehingga dapat hidup yang layak. Frans Seda berpendapat bahwa kesejahteraan merupakan suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual, ditandai dengan situasi yang damai, tertib, serta makmur, yang manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, bukan hanya oleh individu atau kelompok tertentu (Mikhael, 2013).

UU nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Prof. Kranenburg sekaligus pencetus Teori Negara Kesejahteraan menyatakan bahwa Kesejahteraan merupakan keadaan yang dapat dicapai ketika sebuah negara secara aktif berusaha mewujudkan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata dan seimbang (Irwan, 2014). Kesejahteraan menurut Brudeseth (2015) yang dikutip oleh Lusya dalam jurnalnya menyatakan bahwa kesejahteraan adalah tingkat kepuasan hidup yang bertujuan untuk menilai posisi individu dalam mencapai keseimbangan hidup. Keseimbangan ini mencakup beberapa aspek, diantaranya yaitu kesejahteraan materi, kesejahteraan sosial, kesejahteraan emosional dan kesejahteraan rasa aman (Lusya et al., 2021).

2.1.1.2 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat merupakan tujuan utama dari pembangunan ekonomi. Kesejahteraan tersebut dapat diukur melalui Indikator seperti kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Menurut Grubel (1998) yang dikutip oleh Lamanele dalam jurnalnya dikatakan bahwa statistik pendapatan nasional sebagai pengukur kesejahteraan manusia memiliki keterbatasan. Hal tersebut mendorong United Nations Development Program (UNDP) untuk menerbitkan indikator kesejahteraan sosial setiap tahunnya bagi 175 negara, yang kini dikenal sebagai Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Lamanele, 2024).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini terbentuk dari rata rata pencapaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, yang diukur melalui indikator harapan hidup saat lahir, dimensi ini mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat. Kemudian dimensi yang kedua yaitu pengetahuan yang dinilai menggunakan dua indikator, yaitu rata rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah bagi anak usia tujuh tahun. Kedua indikator ini menggambarkan tingkat pendidikan yang telah dicapai dan potensi pendidikan yang diperoleh. Kemudian dimensi ketiga yaitu standar hidup layak, yang diukur berdasarkan pengeluaran riil perkapita yang telah disesuaikan. Dimensi ini mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat (BPS, 2020).

2.1.1.3 Teori Kesejahteraan

1. Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme merupakan Salah satu teori yang memberikan landasan bagi kesejahteraan sosial. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Jeremy Bentham pada abad ke-18. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh filsuf seperti John Stuart Mill. Prinsip utama dari utilitarianisme yaitu *“The greatest happiness for the greatest number”* (kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar). Yang menyatakan bahwa tindakan atau kebijakan yang benar adalah menghasilkan kebahagiaan maksimal bagi mayoritas masyarakat. Dalam karyanya *“Principles of morals and legislation”* (1789). Bentham menegaskan bahwa utilitas atau manfaat suatu tindakan terletak pada kemampuannya untuk memaksimalkan kebahagiaan, baik pada tingkat individu maupun komunitas. Dengan kata lain, kebijakan yang

baik adalah kebijakan yang dapat mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Bentham juga menekankan peran penting pemerintah dalam menjamin kebahagiaan masyarakat melalui kebijakan yang didasarkan pada prinsip utilitas. Hal ini berarti setiap keputusan pemerintah harus diukur berdasarkan dampak positif yang dapat dihasilkan bagi kesejahteraan masyarakat (Bentham, 2000).

2. Konsep Capability Approach (Amartya Sen)

Teori Kesejahteraan melalui pendekatan Kapabilitas atau *Capability Approach* dikemukakan pertamakali oleh Amartya Sen, yang merupakan ekonom dan filsuf asal India pada tahun 1980-an, dengan publikasi utamanya pada tahun 1985. Amartya Sen memperkenalkan pendekatan ini sebagai alternatif dari pendekatan tradisional dalam mengukur kesejahteraan, seperti utilitarianisme (yang fokus pada kebahagiaan) atau pendekatan berbasis sumber daya (yang fokus pada pendapatan/kekayaan). Menurutnya, Kesejahteraan seseorang tidak hanya bergantung pada jumlah kekayaan yang dimiliki, tetapi juga pada kapabilitas individu, yaitu kebebasan untuk memilih dan menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Dalam teori ini pentingnya untuk memperhatikan berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, akses layanan dasar, kebebasan politik, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan kapabilitas Amartya Sen juga menjadi dasar pengembangan Human Development Index (HDI) Oleh United Nations Development Programme (UNDP) atau di Indonesia dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan untuk mengukur

kemajuan pembangunan, dengan memperhitungkan berbagai dimensi kehidupan manusia selain hanya indikator ekonomi (Mukhyi, 2024).

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Todaro & Smith, 2015) Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses peningkatan kapasitas ekonomi suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa dalam jangka waktu yang panjang. Mereka menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi tanpa adanya perbaikan signifikan dalam tingkat kemiskinan, ketimpangan, pendapatan atau kesempatan kerja. Oleh karena itu mereka memperkenalkan konsep pembangunan yang lebih inklusif, yang mencakup dimensi sosial, politik dan lingkungan selain ekonomi.

Menurut (BPS, 2021) Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa, atau proses perubahan kondisi ekonomi suatu negara secara terus menerus untuk mencapai keadaan yang dianggap lebih baik dalam kurun waktu tertentu. (Boediono, 1988) menyebutkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan output perkapita secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Dimana proses ini mencerminkan kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dari waktu ke waktu yang pada umumnya dicapai melalui peningkatan faktor faktor produksi seperti modal, tenaga kerja dan teknologi.

2.1.2.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui berbagai indikator, salah satunya adalah menggunakan Produk Domestik Bruto Atas Dasar (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB sendiri merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan keadaan ekonomi suatu daerah atau wilayah dalam periode tertentu. PDRB didefinisikan sebagai total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha, atau jumlah nilai barang dan jasa pada akhir yang diproduksi oleh seluruh aktivitas ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah. Sementaraitu tujuan dari ADHK adalah untuk menghilangkan pengaruh inflasi atau perubahan harga, sehingga dapat mengukur pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya, atau perubahan volume produksi dan nilai tambah dalam satu periode (Pasalbessy, 2024).

Kemudian, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, maka perlu dilakukan perbandingan antara nilai PDRB pada periode yang berbeda. Peningkatan atau penurunan PDRB menunjukkan sejauh mana perekonomian suatu daerah atau negara berkembang. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan menghitung tingkat pertumbuhannya dari satu periode ke periode berikutnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno dalam (Inggit, 2016) dapat dihitung dengan menggunakan :

$$G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$$

Dimana :

G = Pertumbuhan Ekonomi

$PDRB_1$ = PDRB ADHK tahun ini

$PDRB_0$ = PDRB ADHK tahun sebelumnya

2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu penjelasan logis mengenai bagaimana proses pertumbuhan ekonomi berlangsung. Teori ini mencakup dua hal utama, yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan output perkapita dalam jangka panjang dan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi sehingga terwujudnya proses pertumbuhan ekonomi. (Kardono, 2011).

2.1.2.3.1 Teori Aliran Klasik

Menurut pandangan para ahli ekonomi klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, stok barang modal, luas tanah dan kekayaan serta tingkat teknologi yang digunakan. Teori ini mulai dikembangkan pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, dengan dua tokoh utama yang memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran teori klasik, yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Sebagian besar ekonom klasik lebih menekankan pada pengaruh pertambahan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi (Martadinata, 2022).

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Adam Smith (1723 – 1790)

Menurut Adam Smith yang terdapat dalam karyanya “*An Inquiry the Nature and Causes of the Wealth of Nations*”, yang didasarkan pada konsep *the invisible hand*. Teori ini menjelaskan pertumbuhan ekonomi melalui dua faktor yang saling berkaitan, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total. Pertumbuhan output yang tercapai dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja (pertumbuhan penduduk) dan jumlah persediaan (Martadinata, 2022).

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut David Ricardo (1772 – 1823)

Menurut David Ricardo dalam bukunya “*The Principles of Political Economy and Taxation*”. Bahwasanya pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Pertambahan jumlah penduduk tidak hanya meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia, tetapi juga memperbesar kebutuhan akan tanah dan sumber daya alam (Gobay, 2024).

Dengan demikian, dalam pandangan teori klasik pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh interaksi antara penduduk, sumber daya alam, modal dan teknologi. Dimana pertambahan penduduk menjadi pendorong utama peningkatan tenaga kerja dan kebutuhan ekonomi.

2.1.2.3.2 Teori Aliran Neo Klasik

Teori ini muncul pada abad ke-19 dan 20 sebagai kritik terhadap keterbatasan teori klasik dalam menjelaskan pengaturan harga oleh mekanisme pasar. Neo-klasik merupakan aliran pemikiran ekonomi yang berupaya menjelaskan pembentukan harga, produksi dan distribusi pendapatan melalui mekanisme penawaran dalam suatu pasar. Teori ini dikembangkan oleh beberapa ekonom seperti Alfred Marshal, Harrod-Domar, Robert M solow dan beberapa tokoh lainnya.

1. Teori Alfred Marshall

Salah satu tokoh dari teori neoklasik yaitu Alfred Marshall, dimana dalam bukunya yang berjudul "*Principles of Economics*" ia menekankan bahwa harga dan output ditentukan oleh permintaan dan penawaran, yang digambarkan seperti dua bilah gunting yang bertemu pada titik keseimbangan (Priyono & Ismail, 2017, hlm.39-40). Selain itu Marshall juga berpendapat bahwa utilitas marginal dan biaya produksi saling mempengaruhi keseimbangan pasar. Dimana konsumen akan membeli barang hingga kepuasan marginal yang diperoleh setara dengan harga yang dibayar, sementara produsen akan memproduksi barang hingga biaya marginal yang dikeluarkan setara dengan harga jual (Juliyanto, 2024).

2. Teori Pertumbuhan Solow

Teori ini dikemukakan oleh Robert M. Solow pada tahun 1956. Yang dikenal sebagai Model pertumbuhan solow. Teori ini lebih umum dan sering

digunakan untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Menurut Solow, dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Meskipun sumber daya alam dan tenaga kerja juga berkontribusi, pertumbuhan ekonomi jangka panjang cenderung akan mencapai batasnya jika tidak ada kemajuan dalam teknologi atau penambahan modal. Solow berfokus pada pertumbuhan output ekonomi, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB). Ia percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta menyediakan sumberdaya untuk pembangunan sosial dan infrastruktur. (Mukhyi, 12:2024).

2.1.3 Distribusi Pendapatan

2.1.3.1 Pengertian Distribusi Pendapatan

Perbedaan Distribusi pendapatan atau Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana terdapat perbedaan signifikan dalam pendapatan antar daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Ketimpangan yaitu hal yang tidak sebagaimana mestinya, seperti tidak adil atau tidak beres. Adanya ketimpangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan kondisi demografis dan perbedaan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap wilayah. Akibatnya, terdapat daerah yang lebih maju dibandingkan dengan daerah lain yang masih tertinggal, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat dalam bentuk ketidakpuasan sosial (Sjafrizal, 2012). Menurut (Kuncoro, 2003) Ketimpangan pendapatan di jelaskan sebagai perbedaan distribusi pendapatan antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Artinya tidak semua orang atau daerah

memperoleh pendapatan yang setara, sehingga terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan ekonomi antara pendapatan yang lebih tinggi dan pendapatan yang rendah.

Thomas Piketty, seorang ekonom asal Prancis dalam jurnal yang dikutip oleh (Ramadhan, 2024) berpendapat bahwa ketimpangan ekonomi cenderung meningkat karena keuntungan dan laba modal seringkali meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebagai solusinya ia mengusulkan penerapan pajak progresif atas kekayaan, peningkatan standar upah minimum, serta perluasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan.

2.1.3.2 Indikator dan Pengukuran Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan masyarakat di suatu negara. Sebagai indikator pemerataan yang mencerminkan tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan, alat yang paling umum digunakan yaitu koefisien Gini (Gini Ratio). Menurut (BPS, 2023) Koefisien Gini atau Gini Ratio adalah ukuran untuk menggambarkan tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk, yang divisualisasikan melalui kurva Lorenz. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 – 1. Dimana nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sangat merata, sedangkan nilai 1 mencerminkan ketimpangan yang sangat tinggi, ketimpangan dianggap rendah jika koefisien Gini berada di bawah 0,3 hingga 0,5. Apabila koefisien Gini melebihi 0,5 ketimpangan pendapatan dikategorikan tinggi atau sangat timpang. Selain menggunakan Indeks Gini ketimpangan juga bisa diukur menggunakan

Pengurutan dan pembagian populasi dari termiskin hingga terkaya berdasarkan konsumsi atau pendapatan kemudian dibagi ke dalam kuintil (5 kelompok) atau desil (10 kelompok), biasanya kelompok dengan pendapatan terendah menyumbang 6 – 10 persen dari total pengeluaran, sedangkan kelompok dengan pendapatan tertinggi berkisar antara 35 – 50 persen (Haughton, 2015).

2.1.3.3 Teori Ketimpangan

Kuznet berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, setelah mencapai puncaknya, ketimpangan tersebut akan menurun seiring berjalannya proses pembangunan ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, hubungan antara ketimpangan pendapatan dan GDP per kapita membentuk kurva U-terbalik. Menurut Kurva kuznet, pada tahap awal pembangunan, masyarakat lebih fokus pada konsumsi barang barang dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup daripada memperhatikan kualitas lingkungan yang baik (Cahyani & Aminata, 2020).

2.1.4 Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah)

2.1.4.1 Pengertian Dana ZIS

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban utama dalam ajaran agama islam, secara etimologi zakat berarti tumbuh (*al-numuw*), bertambah (*al-zayidah*), bersih (*al-thaharah*), pujian (*al-madh*), berkah (*al-barakah*) dan baik (*al-shulh*). Secara terminologi zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat

muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan (Baznas, 2022). Undang – undang nomor 38 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa yang dimaksud zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim, sesuai dengan ketentuan agama untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya (Mustahik).

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan. Meskipun zakat merupakan kategori ibadah mahdhah, namun zakat mengandung dua aspek penting. Pertama, *hablum minallah* (hubungan dengan allah) yang menunjukkan bahwa zakat merupakan bukti kesetiaan seorang hamba kepada sang pencipta, Allah SWT. Kemudian yang kedua, *hablum minannas* (hubungan antar sesama manusia), yang mencerminkan aspek sosial, dimana hal hak sosial yang terkandung dalam zakat sebenarnya adalah amanah dari Allah yang diberikan kepada orang kaya untuk disalurkan kepada mustahik sebagai wujud solidaritas sesama manusia. Zakat diwajibkan karena berperan untuk mendorong sirkulasi keuangan melalui partisipasi muzakki (wajib zakat) dan mustahik (penerima zakat). Dana zakat yang disalurkan dapat meningkatkan produktivitas, sehingga memperkuat roda ekonomi. Proses ini melibatkan orang kaya, pemilik modal, produsen, dan pengembang harta yang secara kolektif dapat meningkatkan nilai produksi dan mendorong perputaran ekonomi (Ishak, 2012). Mustahik atau sebutan bagi orang yang berhak menerima zakat terbagi menjadi beberapa golongan (Asnaf) yaitu :

- 1) Fakir, yaitu Seseorang atau Individu yang hidup dalam kondisi sangat miskin, tidak memiliki harta sama sekali, atau kepemilikannya sangat minim sehingga tidak mencapai batas kecukupan (nisab).
- 2) Miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan atau harta, tetapi jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari.
- 3) Amil, yaitu pihak yang bertugas untuk mengelola zakat, mulai dari pengumpulan, distribusi, hingga pengelolaan secara keseluruhan
- 4) Muallaf, yaitu orang yang baru memeluk agama islam atau sedang mendekati islam dan membutuhkan dukungan untuk memperkuat keyakinannya.
- 5) Riqab, yaitu mereka yang masih dalam belenggu perbudakan atau memiliki beban utang yang berat dan memerlukan bantuan untuk membebaskan dirinya.
- 6) Gharimin, yaitu Individu yang memiliki hutang besar untuk keperluan mendesak atau kepentingan umum, namun tidak mampu melunasinya.
- 7) Fisabilillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah SWT, seperti pejuang, pendakwah, ilmuwan, pelajar atau lainnya yang terlibat dalam upaya menegakan kebenaran.
- 8) Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dan mengalami kesulitan, seperti kehabisan bekal atau menghadapi hambatan lain dalam perjalanannya.

2. Jenis Jenis Zakat

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam yang memiliki peran penting dalam membantu masyarakat kurang mampu yang sifatnya wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab atau batasan tertentu. Adapun jenis jenis zakat meliputi :

1. Zakat Fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dimana besaran zakat ini setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok perjiwa. Sebagai alternatif, beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dengan uang senilai jumlah tersebut kemudian disalurkan melalui lembaga penyalur zakat.
2. Zakat Mal, yaitu zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim atas harta yang dimilikinya termasuk hasil usaha perdagangan, pertanian, pertambangan, perikanan, peternakan, harta karun, serta emas dan perak. Dimana perhitungannya digunakan dengan menggunakan Rumus, $2,5 \% \times \text{jumlah harta}$ yang tersimpan selama satu tahun.
3. Zakat Penghasilan (Profesi atau Usaha), yaitu dikenakan pada pendapatan yang diperoleh dari usaha, pekerjaan atau profesi tertentu. Besarannya yaitu 2,5 persen hingga 10 persen tergantung pada pekerjaan dan pendapatan. Dimana zakat ini bertujuan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat muslim dan menciptakan keadilan sosial.
4. Zakat Emas dan Perak, yaitu dikenakan pada emas dan perak yang dimiliki setelah mencapai nisab. Besarannya 2,5 persen dari total kepemilikan.

Tujuannya adalah untuk mendorong distribusi kekayaan agar tidak hanya terakumulasi dalam bentuk yang tidak produktif.

5. Zakat Pertanian, yaitu diberlakukan pada hasil panen , ternak, dan hasil peternakan lainnya, seperti ikan dan tanaman. Besaran zakat bergantung pada jenis hasil dan kondisi lingkungan, dengan persentase yang disesuaikan berdasarkan ketentuan syariat.

3. Hukum Zakat

Hukum zakat dalam agama Islam yaitu wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dimana Hukum zakat ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-qur'an dan Hadits, diantaranya :

- a. QS. Al-Baqarah ayat 43
- b. QS. At-Taubah ayat 103
- c. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim : “Islam dibangun di atas lima perkara : bersaksi bahwa tiada tuhan selain allah dan muhammad adalah utusannya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa bulan ramadhan dan haji ke baitullah bagi yang mampu”.
- d. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim : “Barangsiapa yang diberi harta oleh allah, lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan dijadikan seekor ular besar yang berbisa yang akan melilit lehernya, kemudian ular itu akan menggigit kedua pipinya sambil berkata : aku hartamu, aku simpananmu.
- e. Undang undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

- f. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- g. Keputusan menteri agama Republik indonesia no 114 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (Rafif, 2023).

B. Infaq

1. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqo-yunfiqu* yang artinya membelanjakan atau membiayai. Berbeda dengan zakat, infaq tidak memiliki batasan nisab atau jumlah harta tertentu yang diatur secara hukum. Infaq juga tidak terbatas pada pemberian kepada kelompok mustahik, tetapi dapat disalurkan kepada siapa saja. Secara umum, Infaq adalah bentuk pengeluaran yang dilakukan secara sukarela untuk berbagai keperluan. Dalam istilah syariat, infaq merujuk pada pengeluaran sebagian harta yang dianjurkan dalam islam untuk kepentingan umum. Selain itu, infaq juga dapat diberikan kepada orang-orang terdekat, seperti sahabat, kedua orang tua dan kerabat lainnya. Infaq dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pertama, Infaq wajib, yang mencakup berbagai kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti kafarat, nadzar dan kewajiban lainnya. Infaq jenis ini bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh setiap individu yang memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, yaitu infaq sunnah, yang merupakan bentuk pemberian secara sukarela yang dianjurkan untuk dilakukan. Seperti membantu fakir miskin, kemudian memberikan bantuan kepada orang yang terkena musibah bencana alam dan lain sebagainya (Zulkiflil, 2020).

2. Dasar Hukum Infaq

Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan baik dalam Al-qur'an ataupun hadits :

- a. QS. Adz-Dzariyat ayat 19
- b. QS. Al-Baqarah ayat 245
- c. QS. Ali Imran ayat 134
- d. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim : “Wahai anak adam, infakkanlah hartamu, aku akan menambah hartamu” (HR.Muslim)
- e. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad & Ibnu Majah : Berinfaklah, niscaya aku akan menafkahimu (Bukhari, Ahmad & Ibnu Majah)
- f. Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB I pasal 1 menyebutkan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

C. Shadaqah

1. Pengertian Shadaqah

Secara etimologi, kata “shadaqah” berasal dari bahasa arab yaitu *Ash-shadaqah*. Pada masa awal perkembangan islam, istilah ini merupakan pemberian yang bersifat sunnah atau anjuran. Secara terminologi, shadaqah diartikan sebagai tindakan memberikan sesuatu secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata demi mendapatkan pahala dari Allah SWT. Biasanya shadaqah berupa pemberian harta kepada fakir miskin, mereka yang membutuhkan atau pihak pihak

lain yang berhak menerimanya, tanpa disertai syarat atau balasan apapun (Zulkiflil, 2020).

2. Dasar Hukum Shadaqah

1. QS. Al-baqarah ayat 267
2. QS. Al-Baqarah ayat 274
3. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

“Setiap persendian manusia wajib sedekah setiap harinya. Setiap kali seseorang menyempurnakan shalatnya, maka itulah sedekahnya. Setiap kali seseorang berpuasa, maka (setiap hari) itulah sedekahnya dan setiap kali seseorang berhubungan badan dengan istrinya, maka (setiap hari) itu itulah sedekahnya “ (HR. Bukhari Muslim).

4. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi :

“Dari abu hurairah ra, Rasulullah SAW, bersabda : “Orang yang senantiasa memberi sedekah akan terhindar dari siksa kubur” (HR. Tirmidzi).

2.1.5 Bantuan Sosial

2.1.5.1 Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan Sosial adalah bentuk pemberian yang bersifat sementara dan selektif, berupa uang atau barang, kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya, baik pemerintah daerah sebagai pihak pemberi bantuan maupun masyarakat atau lembaga kemasyarakatan sebagai penerima bantuan, memiliki tanggungjawab untuk

mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku (BPK, 2015). Menurut Permensos nomor 1 tentang penyaluran belanja bantuan sosial menyebutkan bahwa Bantuan Sosial merupakan pemberian berupa uang, barang, jasa yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, kurang mampu atau rentan terhadap berbagai risiko sosial.

Kriteria penerima bansos yaitu mereka yang berdomisili di wilayah administratif atau memiliki e-KTP dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan sosial ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan mengenai kemiskinan, mendukung rehabilitasi sosial, memberikan perlindungan sosial, memberdayakan masyarakat, serta menyediakan jaminan sosial. Anggaran bantuan sosial ditujukan untuk memberikan uang atau barang kepada keluarga yang kurang mampu guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Penyaluran bantuan sosial ini dilakukan secara selektif dengan penggunaan anggaran yang transparan dan jelas (Kurniawan, 2019).

Belanja bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang bersifat konsumtif, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai bagian dari jaring pengaman sosial. Kemudian yang kedua yaitu bantuan sosial yang bersifat produktif ditujukan untuk mendukung permodalan bagi masyarakat dengan ekonomi lemah. Dan yang terakhir bantuan sosial melalui pendidikan, kesehatan dan lainnya yang dapat dilakukan melalui transfer uang, barang atau jasa (Dharmakarja, 2017).

2.1.5.2 Jenis dan Program Bantuan Sosial

Terdapat berbagai jenis program bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat, diantaranya :

1) Program Keluarga Harapan (PKH)

Merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia berupa bantuan sosial. Bantuan ini ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. PKH menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan fokus utama pada pemutusan rantai kemiskinan antar generasi. Di tingkat internasional, program ini dikenal sebagai *Conditional Cash Transfer* (CCT). Sejak pertama kali diluncurkan PKH telah berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat (KPM) (Kemensos, 2020a).

2) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Merupakan program bantuan sosial berupa pangan yang disalurkan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara non-tunai menggunakan uang elektronik. Bantuan ini diberikan setiap bulan dan hanya dapat digunakan oleh KPM untuk membeli kebutuhan pangan di e-warong. Untuk wilayah yang memiliki keterbatasan akses, pelaksanaan program BPNT akan diatur lebih lanjut sesuai kebijakan pemerintah (Pmk, 2013).

3) Bantuan Sosial Tunai (BST)

Merupakan program bantuan keuangan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (KEMENSOS RI) dengan tujuan membantu masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi covid-19. Program ini bertujuan untuk menggerakkan perekonomian nasional dengan meningkatkan daya beli masyarakat, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Kemensos, 2020).

4) Pemberian Iuran Bantuan (PBI)

Merupakan peserta program jaminan kesehatan yang ditujukan untuk fakir miskin dan orang yang tidak mampu, sesuai dengan ketentuan dalam UU SJSN. Iuran untuk peserta PBI yang dibayar oleh pemerintah. Peserta PBI terdiri dari fakir, miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (BPK, 2004)

5) Program Indonesia Pintar (PIP)

Merupakan program bantuan pemerintah yang menyediakan dukungan berupa uang tunai, akses pendidikan yang lebih luas dan peluang belajar bagi peserta didik. Bantuan ini dirancang untuk membantu anak-anak dari keluarga yang miskin atau rentan miskin agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala masalah ekonomi. Selain membantu meringankan biaya pendidikan, PIP juga bertujuan untuk mencegah angka putus sekolah dan mendukung upaya peningkatan sumber daya manusia di Indonesia (Kemendikbud, 2022).

6) Program Kartu Prakerja

Merupakan program pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan. Program ini ditujukan kepada pencari kerja, pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), serta mereka yang membutuhkan peningkatan keterampilan, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Peserta program ini akan menerima insentif berupa bantuan pelatihan kerja sebesar satu juta rupiah perbulannya. Selain itu, peserta juga berhak mendapatkan insentif tambahan sebesar lima puluh ribu rupiah per survei evaluasi, dengan total hingga seratus lima puluh ribu rupiah untuk tiga kali survei yang harus diisi (Menko perekonomian, 2020).

2.1.6 Elastisitas

Elastisitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan suatu variabel dipengaruhi oleh perubahan satu persen pada variabel lain. Konsep ini menggambarkan tingkat respons suatu barang terhadap perubahan faktor – faktor tertentu. Derajat kepekaan ini diukur melalui rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan dengan persentase perubahan faktor yang mempengaruhi jumlah barang tersebut (Purnomo, 2022) .

Menurut (Mankiw, 2009) elastisitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar respons jumlah yang diminta atau jumlah yang ditawarkan terhadap salah satu faktor penentunya. Sedangkan menurut Nicholson (1995) yang dikutip dalam jurnal (Budi S, 2009), elastisitas adalah ukuran yang menunjukkan persentase perubahan suatu variabel akibat perubahan sebesar satu persen pada

variabel lainnya. Sementara itu, Harter (2003) mendefinisikan elastisitas sebagai ukuran respons terhadap perubahan jumlah permintaan. Secara umum elastisitas merupakan konsep yang digunakan dalam ilmu ekonomi untuk mengukur sejauhmana perubahan dalam suatu variabel ekonomi mempengaruhi variabel lainnya. Menurut (Santoso, 2017), elastisitas dapat dikategorikan berdasarkan nilainya, diantaranya sebagai berikut:

1. Inelastis sempurna terjadi Ketika nilai mutlak elastisitas = 0, Ini berarti bahwa perubahan pada variabel X tidak memengaruhi variabel Y sama sekali. Dengan kata lain, nilai Y tetap konstan meskipun X berubah.
2. Inelastis terjadi jika nilai mutlak elastisitas < 1 , Dalam kondisi ini, perubahan pada nilai Y lebih kecil dibandingkan dengan perubahan pada nilai X. Dengan kata lain, diperlukan upaya yang besar untuk meningkatkan nilai Y jika hanya bergantung pada variabel X.
3. Elastisitas Uniter terjadi jika nilai mutlak elastisitas = 1, Artinya, persentase perubahan nilai Y akan sama besar dengan persentase perubahan nilai X, baik itu peningkatan maupun penurunan.
4. Elastis terjadi jika nilai mutlak elastisitas > 1 , Dalam kategori ini, perubahan persentase pada variabel Y lebih besar dibandingkan dengan perubahan persentase pada variabel X.
5. Elastisitas Sempurna terjadi ketika nilai mutlak elastisitas = ∞ . Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai Y selalu ada meskipun nilai X tidak ada.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya atau yang telah ada serta relevan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan peneliti mengenai faktor faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut :

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(Andriyani, Maulana, Aristyanto, 2023), Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan jumlah Penduduk Terhadap Kesejahteraan di Indonesia periode 2018-2022 dengan zis sebagai variabel moderasi	Pertumbuhan Ekonomi (X), Kesejahteraan (Y)	Inflasi dan Jumlah penduduk	Inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan. Sedangkan Jumlah Penduduk berpengaruh positif tidak signifikan.	WORLDVIEW (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Sosial Sains) 2(2):95-108
2	(Arifin, Maifita, Hutasuht, 2020) The Effect Of Capital Expenditure And Economic Growth On The Human Development Index Of The District / City In North Sumatera	Pertumbuhan Ekonomi (X), IPM (Y)	Belanja Modal	Pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif signifikan, terhadap IPM.	Advances in Social Sciences Research Journal – Vol.7, No.1 Publicatio, 2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	(Mahmut, Fatmawati, Anwar, 2022) Analisis Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan	Pertumbuhan Ekonomi (X), Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Pengeluaran Pemerintah, Penyerapan, investasi	Pengeluaran pemerintah berpengaruh dan investasi berpengaruh positif. Sedangkan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat	SEIKO : Journal of Management & Business, 5(1), 2022
4	(Khadijah, Saharudin, Anwar, Martala, 2022) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap IPM di Kabupaten Simalungan	Pertumbuhan Ekonomi (X), IPM (Y)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan ekonomi dan Jumlah penduduk berpengaruh negative tidak signifikan terhadap IPM	Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi JAIE 74 Volume 1, No. 1, September 2022
5	(Sihite, dkk, 2022) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Jawa Timur	Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini (X), IPM (Y)	Kemiskinan, PDRB	PDRB perkapita berpengaruh positif signifikan, Kemiskinan berpengaruh positif tidak signifikan dan Indeks Gini, Laju Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM	SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Volume 2 No 1 Februari 2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	(Lamanele, Engka , Agnes, 2024) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Papua Barat	Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas pendapatan (X), Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Distribusi Dana ZIS dan Bantuan Sosial	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan dan Disparitas pendapatan berpengaruh positif tidak signifikan .	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 24 No. 1 (2024)
7	(Agustin& Rojani, 2022) Analisis Faktor faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Manusia di Sumatera Barat	Gini Ratio, Laju PDRB (X), Indeks Pembangunan Manusia (Y)	Kemiskinan	Kemiskinan dan Laju PDRB berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Gini Ratio berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM	E-JURNAL Universitas Bung Hatta
8	(Kusuma & Anis, 2024) Determinan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat	Distribusi Pendapatan (X), Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Pengeluaran Pemerintah Sektor pendidikan, kesehatan dan Investasi	Distribusi Pendapatan berpengaruh negative namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan Masyarakat.	Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP) JEL: H75, I25,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	(Lestari, 2023) Pengaruh Dana ZIS, Upah Minimum Provinsi dan Kemiskinan Terhadap IPM di Indonesia	Dana ZIS (X), IPM (Y)	Upah Minimum dan Kemiskinan	Dana ZIS berpengaruh positif signifikan, sedangkan Upah Minimum dan Kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM masyarakat	Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam , Vol. 4 No. 2 (2023)
10	(Wibowo, Gunaefi, 2021) Pengaruh ZIS, Kemiskinan dan harapan lama sekolah terhadap Indeks pembangunan manusia di provinsi jawa barat	Dana ZIS (X), IPM (Y)	Kemiskinan dan harapan lama sekolah	Kemiskinan berpengaruh positif signifikan, sedangkan Dana ZIS dan harapan lama sekolah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM	Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol. 11 No 1 Tahun 2021: 19–28
11	(Muftin,Kuniawan, 2023) Analysis of the Effect of Zakat, Investment and Salary Wages on Community Welfare in Central Java Province in 2017-2021 with Economic Growth as a Moderating	Zakat (X), Kesejahteraan (Y)	Investasi dan Upah.	Investasi dan Upah berpengaruh positif signifikan sedangkan Zakat berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesejahteraan.	AIC IEB : Annual International Conference on Islamic Economics and Business, 2023, Vol 3, 198-212
12	(Khasandy, Badrudin, 2013) The Influence of Zakat on Economic Growth and Welfare Society in Indonesia	ZIS (X), IPM sebagai Indikator Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Pertumbuhan ekonomi, Gini Ratio (Y)	Zakat tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Zakat berpengaruh negatif terhadap IPM)	IJBE (Integrated Journal of Business and Economics) e-ISSN: 2549-3280/p-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	(Sari, subianto, saleh, 2022) Social Economic Variables Influence on HDI With Data Panels Regression in Klassen Cluster at East Java Province	Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio (X), IPM (Y)	kepadatan penduduk, kriminalitas, dan pemberdayaan gender	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh, sedangkan Gini ratio berpengaruh signifikan terhadap IPM	Journal of Economic Development, Environment and People Volume 11, Issue 1, 2022
14	(Siregar, Erlina & Sirojuzilam, 2023) Pengaruh Alokasi Belanja Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Terhadap Tingkat IPM Kabupaten/Kota prov Aceh	Bantuan Sosial (X), IPM (Y)	Belanja pendidikan, dan belanja kesehatan	Belanja Pendidikan berpengaruh negatif tidak signifikan, belanja kesehatan berpengaruh positif signifikan dan belanja bantuan sosial berpengaruh positif tidak signifikan	Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) Volume 4, Nomor 1, 2023
15	(Harsono, Punama, Irwansyah, dkk, 2024) Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi NTB Tahun 2013-2022	Belanja Bantuan Sosial (X), IPM (Y)	Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan	Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial berpengaruh positif signifikan terhadap IPM	MSEJ: Management Studies and Entrepreneurship Journal, Vol. 5 No. 1 (2024)

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, maka disusunlah kerangka berpikir yang bertujuan untuk menjelaskan Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Disparitas pendapatan, Distribusi Dana ZIS dan Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. ketika perekonomian berkembang dengan baik, sektor-sektor usaha dan industri akan mengalami peningkatan, yang pada gilirannya membuka lebih banyak lapangan kerja dan menciptakan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yaitu peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan hasil dari seluruh aktivitas di berbagai sektor ekonomi serta menggambarkan sejauh mana masing-masing sektor berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi nilai PDRB di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Riazis, 2022).

Secara umum, teori pertumbuhan ekonomi mencakup pandangan dari berbagai aliran, termasuk teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori neoklasik. Teori aliran klasik merupakan teori yang dicetuskan oleh para ekonom klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo dimana dalam teorinya mendasarkan pada analisis tentang pentingnya faktor produksi dan keyakinan terhadap mekanisme

pasar bebas. Sementara teori neoklasik yang dikembangkan oleh ekonom seperti Alfred Marshal dan Robert Solow, lebih menekankan pada peran teknologi, akumulasi modal dan efisiensi tenaga kerja sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori ini juga menekankan pentingnya kebijakan pemerintah dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Gobay, 2024).

(Andriyani, 2022) dalam Penelitiannya menyimpulkan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Hal ini dapat memiliki makna semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berpotensi dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja, meningkatkan pendapatan dan memperluas akses terhadap pelayanan seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dan mengurangi tingkat kemiskinan, serta memperkuat daya beli masyarakat yang pada gilirannya mendukung tercapainya kesejahteraan yang lebih merata.

2.2.2 Hubungan Distribusi Pendapatan dengan Kesejahteraan Masyarakat

Disparitas pendapatan mencerminkan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan antara individu atau kelompok masyarakat. Ketimpangan ini dapat menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika disparitas pendapatan tinggi, masyarakat berpenghasilan rendah cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan, kesehatan ataupun peluang

ekonomi lainnya. Ketimpangan pendapatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti inflasi, tingkat pengangguran, kemiskinan dan faktor lainnya. Untuk mengukur ketimpangan ini, salah satu indikator yang sering digunakan adalah Indeks gini, Secara umum, semakin tinggi nilai indeks gini, semakin besar pula tinggi pula tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan masyarakat. (Fitrianto, 2024).

Berbagai teori menjelaskan hubungan antara ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Teori Kuznets menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan akan meningkat pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, namun akan berkurang seiring waktu melalui pendapatan dan akses yang lebih merata. Sementara itu, teori kesejahteraan menekankan pentingnya kebijakan redistribusi, seperti pajak progresif dan transfer sosial, untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kedua teori ini menggaris bawahi perlunya kebijakan inklusif untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih merata. (Wibowo, 2016).

(Sihite, 2024) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Disparitas Pendapatan yang diukur menggunakan Indeks Gini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Indeks gini maka semakin tinggi ketimpangan pendapatan di masyarakat. sehingga akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, karena ketimpangan yang tinggi dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi, serta memperlebar jurang kemiskinan di antara kelompok masyarakat.

2.2.3 Hubungan Dana ZIS dengan Kesejahteraan Masyarakat

Perekonomian suatu negara seringkali diukur melalui kesejahteraan masyarakatnya, dimana salah satu cara yang dapat memperbaiki keadaan ekonomi dan mengurangi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan umat dengan Zakat, Infak, dan Sedekah. Zakat yang dikeluarkan merupakan salah satu bentuk distribusi pendapatan yang bertujuan untuk menyeimbangkan pendapatan supaya lebih merata. sekaligus membantu orang fakir ataupun miskin dapat memenuhi kewajibannya kepada Allah SWT. Potensi besar yang dimiliki dana ZIS dapat dimanfaatkan secara optimal jika dikelola dengan baik oleh lembaga amil zakat.

Menurut (Khairina, 2013), pengelolaan yang efektif dari dana ZIS dapat mengurangi kemiskinan secara bertahap, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu (Tsaniya, 2023) menjelaskan bahwa selain mengurangi kemiskinan, penggunaan dana ZIS yang tepat juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan mendukung berbagai program yang dapat menciptakan pekerjaan seperti pelatihan, pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Dengan demikian Zakat, Infak dan Sedekah bukan hanya sebagai sarana sosial, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2023) disimpulkan bahwa Dana ZIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. yang berarti bahwa ketika Dana ZIS meningkat, maka akan terjadi perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dalam peningkatan

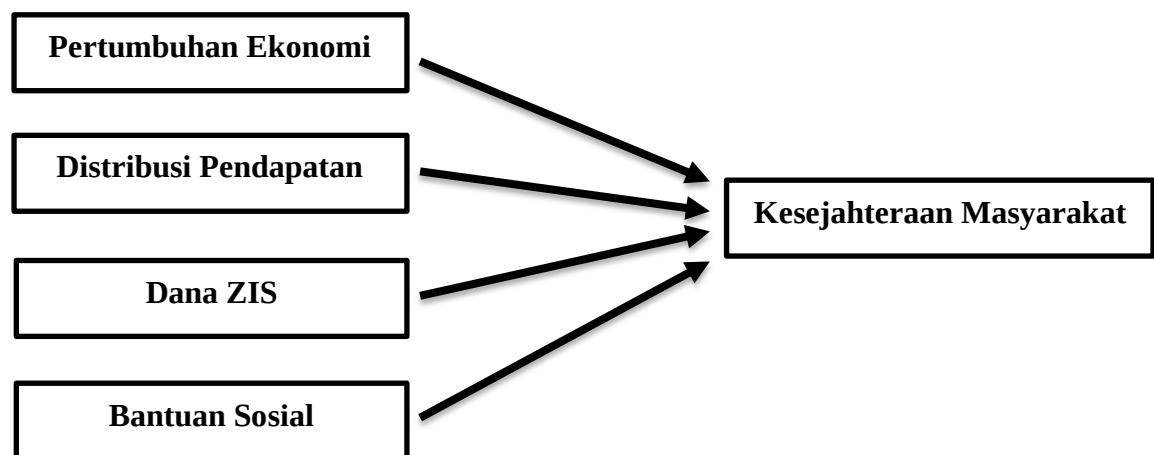
pendidikan, kesehatan serta pendapatan perkapita, yang secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.2.4 Hubungan Bantuan Sosial dengan Kesejahteraan Masyarakat

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk mendukung masyarakat yang berada dalam kondisi rentan, seperti kemiskinan, pengangguran atau dampak bencana alam. Dengan adanya bantuan sosial ini diharapkan masyarakat dapat mengalami peningkatan taraf hidup yang lebih baik. Menurut Naukoko (2023), bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada individu atau kelompok masyarakat, dengan penyaluran yang disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah dan dilakukan secara selektif.

Sumiryaiti (2022) menjelaskan bahwa dalam struktur APBN/APBD di Indonesia, belanja dibagi menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Salah satu bentuk belanja langsung adalah belanja modal, sedangkan belanja tidak langsung mencakup belanja bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial serta upaya untuk melindungi individu dan masyarakat dari resiko sosial. Program-program ini memiliki peran penting dalam memperbaiki kesejahteraan sosial serta memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan dan menciptakan kestabilan ekonomi yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tamara & Yeniawati, 2020) menunjukan bahwa Belanja Bantuan Sosial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. yang berarti bahwa meskipun peningkatan belanja bantuan sosial dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, namun dampak dari bantuan sosial ini rupanya masih belum dirasakan secara merata. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis pengaruh keempat variabel independen terhadap kesejahteraan masyarakat di pulau jawa tahun 2013 – 2023. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah dalam suatu penelitian, yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau kalimat. Jawaban ini disebut sementara karena didasarkan pada teori yang relevan, namun belum di dukung oleh fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Diduga secara parsial pertumbuhan ekonomi, dana ZIS dan bantuan sosial berpengaruh positif, sedangkan distribusi pendapatan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa Tahun 2013 – 2023.
2. Diduga secara bersama sama pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dana ZIS dan bantuan sosial berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa Tahun 2013 – 2023.